

MINORITAS KATOLIK DAN HINDU DALAM LAYANAN KEMENTERIAN AGAMA DI JAYAPURA

Paisal

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72, Makassar
Email: umar.faisal@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menelisik implementasi kebijakan pelayanan Kementerian Agama (kemenag) terhadap penganut agama minoritas Katolik dan Hindu di Kota Jayapura, serta tanggapan penganut agama minoritas tersebut terhadap pelayanan kemenag. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah penganut agama Hindu dan Katolik, serta pihak Kemenag Jayapura, khususnya pelayanan terhadap agama Katolik dan Hindu. Analisis data dilakukan dengan deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, hubungan antar dan intra keagamaan saat ini dalam kondisi yang kondusif, saling menjaga, saling menghargai, dan menghormati. Semua agama dapat tumbuh dan melaksanakan kegiatan keagamaannya tanpa halangan, karena didukung kebijakan pemerintah kota yang terbuka dan mengayomi semua pemeluk agama. Meski begitu, pelayanan kemenag terhadap penganut agama Katolik dan Hindu pada setiap lini terbentur pada ketersediaan sumber dana dan sumber daya manusia, utamanya pada pelayanan di bidang pendidikan.

Kata Kunci: Pelayanan, minoritas, Jayapura

PENDAHULUAN

Hubungan antara mayoritas dan minoritas selalu menarik untuk ditelisik, hal ini terkait dengan penguasaan sumber-sumber layanan lebih istimewa dimiliki oleh kelompok mayoritas dibandingkan dengan minoritas yang seringkali tidak memiliki akses memadai untuk memperoleh layanan memuaskan. Kelompok minoritas kurang mempunyai akses terhadap sumber daya, privelese, dan kurang berpeluang mendapat kekuasaan seperti mayoritas. Atas dasar inilah sehingga mendorong prasangka mayoritas terhadap minoritas, misalnya dengan mengatakan kelompok minoritas lebih rendah kedudukannya daripada mayoritas Liliweri (2005:102). Memang, akhir-akhir ini, isu-isu

mayoritas dan minoritas menjadi perbincangan serius hampir semua kalangan. Isu tersebut kemudian muncul menjadi sebuah diskursus, yang merambah ke semua lini (agama/religi, sosial, politik, dan kebudayaan).

Dalam beberapa kasus pendirian rumah ibadat terungkap betapa sulitnya kelompok minoritas untuk mendirikan rumah ibadat, selain kesulitan untuk memenuhi kuota yang dipersyaratkan oleh PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang mulai berlaku efektif sejak

ditandatangani tanggal 21 Maret 2006 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, kelompok dengan jumlah pengikut yang sedikit juga seringkali terbentur dengan kebijakan yang umumnya dikuasai oleh kelompok mayoritas. Hal ini terungkap di dalam hasil penelitian Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar pada 2014.

Selain persoalan rumah ibadat, bidang pendidikan juga menjadi sorotan dalam beberapa hasil penelitian yang menunjukkan tidak tersedianya guru agama bagi penganut agama minoritas yang menempuh pendidikan pada beberapa sekolah baik negeri maupun sekolah yayasan (Laporan Hasil penelitian Balai Litbang Agama: 2014). Hal ini juga ditunjang dengan minimnya pendanaan yang dialokasikan untuk kelompok minoritas tersebut.

Problem lain ditemukan pula di dalam penelitian Sapriallah (2013:187), yakni mengenai transparansi dan partisipasi minoritas. Publik Hindu sebagai stakeholder sejauh ini tidak mengetahui dengan baik hal-hal apa yang menjadi program kerja yang diprogramkan oleh Kemenag. Ini karena partisipasi publik dalam penyusunan ataupun dalam pengambilan keputusan tidak terjadi. Kemenag “menjauhkan diri” dari publik karena menganggap sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh publik. Kemenag hanya mengembangkan sistem yang bersifat empati. Kondisi tersebut menimbulkan kesan diskriminasi terhadap minoritas untuk memperoleh layanan yang setara.

Karena itu, menarik untuk melihat lebih jauh implementasi kebijakan pelayanan kemenag terhadap penganut agama minoritas di Kota Jayapura, dan persepsi penganut agama minoritas terhadap pelayanan kemenag di kota ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mendeskripsikan kebijakan pelayanan terhadap penganut agama minoritas oleh Kemenag Kota Jayapura. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dilengkapi dengan atas studi pustaka terkait. Informan penelitian adalah beberapa penganut agama Hindu dan Katolik, serta pihak Kemenag Jayapura terkait pelayanan terhadap agama Katolik dan Hindu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen terkait tema penelitian.

PEMBAHASAN

Pilihan lokasi riset pelayanan agama minoritas di Kota Jayapura berdasarkan asumsi dasar, bahwa konflik dan kekerasan yang memicu konflik berbau SARA bisa berawal dari ketidakadilan dalam segi-segi pelayanan pemerintah. Jayapura sebagai satu kota minipolis sedang menggeliat dalam pembangunan, dan banyak imigran yang menjadikan Jayapura sebagai lokasi untuk mencari penghidupan. Mayoritas pendatang adalah pedagang, pengusaha, dan karyawan. Hal ini mempengaruhi tingkat perkembangan penganut pemeluk agama di mana mayoritas Kristen sudah hampir setara jumlahnya dengan penganut agama Islam.

Kota Jayapura sejatinya sebuah kota kecil dengan luas 940 km² (94.000 Ha). Meski ukurannya terbilang kecil, Jayapura telah menjadi sebuah kota utama di Papua. Kota ini terdiri atas 5 distrik, 25 kelurahan, 14 kampung, dan 1.306 RT/RW. Mereka menyebutnya sebagai sekeping sorga yang jatuh ke bumi, di antaranya karena topografi

Paisal

yang terdiri atas daerah dataran, landai, dataran tinggi, pantai dan gunung yang mempesona termasuk kawasan perbukitan yang terletak hingga 700 meter dari permukaan laut. Kondisi kontur tersebut membuat Kota Jayapura unik, eksotik dan indah. Bagi yang senang melihat panorama alam berkunjunglah ke daerah ketinggian yang banyak menjadi sasaran traveler di sore dan malam hari karena pemandangannya yang menakjubkan, tempat menarik untuk memandangi Kota Jayapura di malam hari adalah kawasan Pemancar Polimak atau daerah angkasa dan ada banyak lagi destinasi lainnya. Jayapura memiliki pelabuhan yang cukup besar dan banyak disinggahi kapal

besar. Karenanya, Jayapura menjadi tempat transit para pendatang dari berbagai daerah dari berbagai etnis dan destinasi favorit sehingga membentuk “Indonesia mini”.

Dalam lingkup Kota Jayapura, jumlah pemeluk agama Kristen menempati urutan pertama dengan jumlah 283.493 ribu atau 49% penganut, Islam di posisi kedua dengan jumlah 254.100 atau 44%. Berikutnya, berturut-turut Katolik dengan 34.991 atau 6%, Buddha dengan jumlah penganut 1.741 jiwa atau 1% dan Hindu dengan jumlah 1.143 atau 0,7% seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Agama yang Dianut di Kota Jayapura

No	Distrik	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	Muara Tami	11,419	7,095	1,213	19	3	19,749
2	Abepura	77,181	81,962	10,224	256	289	69,912
3	Heram	31,720	52,671	9,546	131	184	94,252
4	Jayapura Selatan	72,760	68,457	5,843	238	885	48,183
5	Jayapura Utara	61,020	73,308	8,165	499	349	43,341
JUMLAH		254,100	283,493	34,991	1,143	1,710	575,437

Sumber: Data Kementerian Agama Kota Jayapura 2017

Di Jayapura, posisi mayoritas dalam jumlah adalah Kristen dan Islam sedangkan Katolik menempati urutan ketiga. Persebaran pemeluk agama Katolik lebih dominan di sisi bagian selatan Provinsi Papua, sehingga jika melihat angka pemeluk agama pada tingkat provinsi sebenarnya posisi Katolik menempati urutan kedua di bawah posisi Kristen. Pemeluk agama Islam mayoritas terkonsentrasi di kota-kota besar. Hal ini disebabkan sebagian besar penganut agama Islam adalah penduduk yang awalnya pendatang serta mayoritas bekerja sebagai pengusaha, pedagang atau karyawan. Di Kota Jayapura, pemeluk agama Katolik juga boleh dikatakan tidak ada penduduk dari suku asli Port Numbay yang memeluk agama Katolik, kebanyakan mereka adalah penduduk pendatang baik dari daerah Papua bagian

selatan maupun dari daerah lainnya (Wawancara, Pendeta Andreas Trismadi, di Jayapura, 2017).

Sementara itu, rumah ibadat berbagai agama ada di Jayapura. Masjid dan musholla sebagai representasi keberadaan penduduk muslim tersebar di semua wilayah distrik, paling sedikit terdapat di Jayapura Selatan dan Jayapura Utara. Di distrik Muara Tami, Abepura dan Heram sangat mudah menemukan rumah ibadat umat Islam, hampir setiap jalan ada masjid maupun musholla. Masjid musholla tersebut sebahagian besar dibangun menggunakan dana swadaya masyarakat dan melalui kotak amal yang diantar oleh anak-anak ke berbagai tempat keramaian, warung dan pasar. Begitu dengan gereja Kristen yang sangat banyak jumlahnya dan dari berbagai latar belakang denominasi.

Gereja Katolik hanya terdapat 13 buah dengan 22 Kapela, gereja tersebut umumnya sudah tua, beberapa gereja sedang direnovasi dan tidak ada gereja yang baru dibangun meski umat Katolik harus bergantian untuk beribadat.

Pertumbuhan pesat berbagai rumah ibadat yang baru ini didukung oleh kebijakan Walikota Jayapura yang sangat lunak terhadap perizinan pendirian rumah ibadat, ketika di terjadi pembakaran gereja di Aceh Singkil karena persoalan IMB, sekelompok anak muda agama tertentu mempertanyakan keberadaan masjid musholla yang ditengarai

tidak memiliki izin, Walikota Benhur Tommi Mano mengatakan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Muslim untuk beraktifitas dan tidak dirubuhkan, meski yang belum berizin digunakan pendekatan persuasif untuk segera mengurus perijinannya (Ridwan Al-Makassary:90). Begitupula pendapat berbagai pemuka agama yang tergabung dalam FKUB bahwa persoalan rumah ibadat selayaknya diselesaikan dengan cara damai tanpa saling mencederai antar pemeluk agama (Wawancara, Syamsuddin, di Jayapura, 2017).

Tabel: Jumlah Tempat Ibadah Menurut Distrik di Kota Jayapura Tahun

No	Distrik	Islam		Katolik		Kristen	Vihara	Pura	Jml
		Masjid	Mushola	Gereja	Kapela				
1	Muara Tami	38	6	4	-	45	-	-	93
2	Abepura	32	1	3	7	53	-	1	99
3	Heram	29	8	1	10	43	6	1	98
4	Jayapura Selatan	7	37	2	2	25	-	-	73
5	Jayapura Utara	12	3	3	3	47	-	-	68
JUMLAH		118	55	13	22	213	6	2	431

Sumber: Data Kementerian Agama Kota Jayapura 2017

Relasi Mayoritas dan Minoritas

Jayapura saat ini sedang menikmati kondisi yang kondusif, dimana setiap pemeluk agama dapat menjalankan kegiatan keagamaan dan juga hidup berdampingan dengan damai secara relatif. Meski, diakui pada beberapa tempat di sekitarnya gejala-gejala intoleransi antar umat beragama, yang dapat mengancam Papua sebagai tanah damai tidak dapat diabaikan. Masih pekat di dalam ingatan kita insiden Tolikara 17 Juli 2015, Polemik surat edaran Persekutuan Gereja-gereja di Jayawijaya 25 Februari 2016 yang intoleran terhadap Muslim di Wamena, Kontroversi pembangunan sebuah masjid di Manokwari. Bahkan di Kota Jayapura, menjelang Natal 2015, telah terjadi ketegangan skala kecil antara pengikut Jafar Umar Thalib dengan barisan Muslim

Moderat. Beruntung, kejadian tersebut dapat diredam dan kini Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua patut berbangga menyebut diri sebagai satu kota yang kondusif untuk semua agama.

Pertikaian horisontal yang terjadi di daerah lain, senantiasa menjadi perhatian pemimpin umat beragama termasuk penganut agama untuk dapat memfilter atau tetap berkomunikasi agar dapat meredam isu-isu yang berasal dari luar Kota Jayapura. Papua khususnya Kota Jayapura yang selama ini telah terbangun jalinan yang harmonis di antara umat beragama, menjadi tantangan tersendiri untuk senantiasa memelihara kondisi yang aman tersebut. Masyarakat Kota Jayapura, Ibukota Papua hingga kini tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama sehingga wilayah Jayapura dalam keadaan aman dan kondusif. Banyak yang

Paisal

bahkan menggelari Jayapura sebagai “Indonesia Mini” dengan beragam agama dan etnis yang berkumpul dan hidup damai di sana (Wawancara Kakan Kepala Kemenag Kota Jayapura dan Kabid Bimas Katolik Kanwil Kemenag Papua di Jayapura, 2017).

Kerukunan internal Katolik cukup baik karena tidak ada denominasi. Begitupula dengan eksternal Katolik, walaupun ada itu dengan Protestan misalnya di Tolikara, kami sendiri Katolik dilarang disana. Berbicara dalam lingkup Kota Jayapura itu sangat aman, disini ini klo datang ke Papua penduduk setempat itu mereka malah senang karena mereka yang dari agama berbeda itu mau berdoa dengan Tuhannya, beda dengan tempat lain yang selalu jadi masalah jika beda. Itulah yang seringkali saya katakan siapapun yang datang ke Papua ini tolong cerita yang baik tentang Papua ini, disini khususnya di Jayapura ini baik sekali tidak ada masalah mau dirikan masjid, mushollah kah, gereja kah ya silahkan saja. Hubungan antar umat di Jayapura ini sangat baik, kami saling menjalin silaturahmi, ada persekutuan lintas agama, khususnya dengan NU kami sangat baik. Kami mengadakan pertemuan intensif, bahkan dalam beberapa peringatan misalnya dalam 5 Februari diperingati sebagai masuknya Injil di tanah Papua itu dihadiri oleh lintas agama, bahkan dulu kami mengadakan pawai bersama-sama. Walaupun ada misalnya gesekan-gesekan itu sebenarnya pemain baru, jadi kelompok minoritas dari agama yang sama. Misalnya kita dihebohkan dengan kedatangan Jafar Umar Thalib yang kita tau bisa menyebabkan perang antar agama.

Deklarasi Penetapan zona kerukunan antar umat beragama yang diluncurkan bersamaan dengan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVI tingkat Provinsi Papua dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) I Kabupaten Jayapura, Sabtu, 28 Mei 2016, di Stadion Bas Youwe, Sentani. Berbagai tokoh dari lingkungan agama maupun adat, menandatangani nota kesepahaman disaksikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Gubernur Papua Klemen

Tinal serta Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, dilakukan untuk menjaga kerukunan tetap tercipta di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya.

Pada umumnya masyarakat Papua majemuk, baik dalam hal suku, agama maupun budayanya. Dalam kemajemukan itu, mereka tetap membina kerukunan hidup antarumat beragama. Setiap kelompok umat beragama senantiasa memahami sejarah perkembangan agama-agama di wilayah ini dan atas kesadaran akan sejarah itulah maka mereka pun saling menghargai satu sama lain. Sikap toleransi tersebut terlihat dari kerja sama yang dilakukan antarumat beragama di Kota Jayapura. Peran lembaga Nahdlatul Ulama dalam menjaga kerukunan itu tampak ketika umat Nasrani sedang melangsungkan ibadah keagamaan, beberapa pemuda Islam bergantian menjaga keamanan di sekitar tempat ibadah, begitu pun sebaliknya pada hari raya Umat Islam yang sangat meriah Pemuda non Muslim yang umumnya Kristen dan Katolik membantu menjaga Tempat Sholat Id, mengatur parkir hingga memberi koran bekas secara cuma-cuma untuk digunakan sebagai alas sajadah (Wawancara, Herni, di Jayapura, 2017).

Umat Muslim di Jayapura juga terbiasa, Papua, melakukan silaturahmi ke umat Nasrani yang merayakan Natal untuk mengucapkan Selamat Natal sebagai tanda ikut bergembira pada pesta kelahiran Isa Almasih sekaligus meningkatkan kerukunan dan toleransi hidup antar umat beragama dan demikian pula sebaliknya bila hari raya Islam kaum umat nasrani juga datang memberikan ucapan selamat.

Herni seorang muslim, ibunya yang penduduk asli Papua dari suku Yoka yang wilayahnya berada di daerah tapal batas Abepura dan Waena. Keluarga mereka adalah satu contoh bagaimana interaksi antarumat

dalam satu keluarga, dalam satu klan yang agamanya berbeda namun tetap hidup berdampingan dengan damai. Selain suku Yoka, di Jayapura juga merupakan wilayah suku Nafri, Waena, Yoka, Enggros, Tobati, Kayupulo dan Kayubati.

Suku Yoka sebagaimana suku lainnya sebagai satu suku kecil yang sudah kehilangan banyak wilayah, karena dijual kepada pendatang yang memiliki banyak modal. Posisi suku asli semakin tergeser ke pinggiran kota karena ketidakmampuan mengikuti persaingan ekonomi yang digelar para pendatang. Jumlah mereka terus menyusut, penelitian LSM KIPRA (2014) mengungkap jumlah penduduk Jayapura 273.928 jiwa (sensus 2012) sedangkan penduduk asli Port Numbay berjumlah 3.633 jiwa. Apabila kita hubungkan dengan jumlah total penduduk Jayapura maka ada 270.295 jiwa yang bukan penduduk asli Port Numbay ini berasal dari etnis mana?. Karenanya tidak salah ungkapan penduduk kota Jayapura adalah multi etnis dengan penduduk asli yang akan semakin berkurang prosentase pertumbuhannya dibanding dengan etnis lainnya.

Meski begitu patut diwaspadai kondisi Jayapura dengan komposisi penduduk yang relatif berimbang dari segi agama bisa memunculkan klaim masing-masing kelompok yang merasa lebih berhak memiliki, khususnya rasa kepemilikan terhadap Papua. Perubahan komposisi penduduk juga memicu kekhawatiran mengenai konflik antaragama di Papua. Kedatangan para pendatang ke Papua yang kebetulan mayoritas Muslim, menimbulkan kekhawatiran masyarakat lokal yang mayoritas Kristen. Persoalan yang dapat timbul selanjutnya adalah gesekan antara masyarakat asli Papua dengan pendatang yang berujung pada konflik keberagamaan

antara Kristen dan Islam dalam berbagai bentuknya. Agama pun bisa menjadi ruang bagi politisasi konflik sektarian.

Papua tanah damai merupakan semboyan sekaligus komitmen yang dideklarasikan para pemimpin agama (Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Buddha). Dan motto Papua tanah damai selanjutnya berkembang menjadi visi dari masyarakat lintas agama di Papua. Dalam mendukung terciptanya Papua sebagai zona damai melalui pembinaan iman dan taqwa. Agama harus menjadi kunci hati dan nalar manusia, mengarahkan tiap orang mengamalkan agamanya yang tercermin dari perilaku hidup ditengah masyarakat, kehidupan yang saling mengasihi, mendatangkan kedamaian dan cinta kasih sehingga memperkuat persaudaraan dan persatuan antara sesama. Dan Jayapura sebagai ibukota yang tidak mengenal kaum minoritas maupun mayoritas sehingga ketika seorang Muslim hendak membangun mesjid terkadang seorang Kristiani pun turut membantu pembangunannya, di sini dapat dilihat betapa saling menghormatinya satu agama dengan agama yang lain.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Atas dasar Undang-Undang itu, semua warga Negara dengan beragam identitas kultural, suku, jenis kelamin, agama dan sebagainya wajib dilindungi oleh Negara. Ini juga berarti Negara tidak boleh mendiskriminasi warganya dengan alasan apapun. Pemerintah dan semua warga Negara berkewajiban menegakkan konstitusi tersebut. Atas dasar itu pula maka pemeluk agama islam yang minoritas di Papua dijamin Negara dan agamanya untuk melakukan peran apapun dalam hidup dan kehidupannya, sebagaimana

pula peran agama mayoritas dan minoritas lainnya di Papua.

Pelayanan Kemenag terhadap Penganut Agama Minoritas di Jayapura

Pelayanan terhadap Umat Katolik

Sebagai minoritas, sisi pelayanan keagamaan Katolik di Kemenag Jayapura mengalami berbagai macam kendala, di antaranya kurangnya jumlah personil dan pendanaan. Bimas Katolik Kota Jayapura terdiri atas satu kepala seksi dengan empat staf, satu penyuluh PNS, dan 10 penyuluh non-PNS untuk tahun 2016. Penyuluh non-PNS diangkat dari para pastor gereja, karena mereka yang selama ini melakukan pembinaan keagamaan kepada umat.

Tahun 2017, seksi Katolik menghadapi kendala yang cukup pelik dalam pengangkatan kembali tenaga penyuluh non-PNS terkait banyaknya persyaratan administratif yang mesti terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh para pastor tersebut banyak yang tidak memiliki administrasi kependudukan. Pastor tidak menikah dan tidak membangun sebuah keluarga sendiri. Juga disebabkan sebagai pelayan umat mereka kadang berpindah ke daerah lain. Insentif yang diberikan juga sangat minim untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di Kota Jayapura, karenanya ada sebagian penyuluh yang tidak mau direpotkan urusan administratif hanya untuk insentif itu.

Kegiatan seorang penyuluh PNS Katolik di Jayapura adalah pelayanan keagamaan di sekolah-sekolah dan membantu memberikan materi pendidikan agama Katolik, bimbingan rohani berkelompok, maupun perseorangan dengan bentuk konsultasi bagi umat. Kegiatan lain yang dilakukan adalah menjadi fasilitator kegiatan-kegiatan keagamaan umat serta membina Orang Muda Katolik (OMK). Penyuluh

terlibat aktif dalam membantu memfasilitasi kegiatan OMK berupa bakti sosial, persiapan hari raya, pelatihan kepemimpinan dan pembinaan mental spiritual pemuda Katolik.

Minimnya alokasi dana yang tersedia untuk Seksi Katolik menyebabkan banyak program kegiatan yang tidak terakomodasi. Untuk bantuan rumah ibadat, minimnya anggaran yang tersedia menyebabkan gereja-gereja Katolik terkesan enggan untuk mengajukan permohonan bantuan dana. Menurut Kepala seksi Bimas Katolik “anggaran terbatas untuk pembangunan/renovasi rumah ibadat, rata-rata hanya tersedia sekitar 5-10 juta rupiah, sementara di sisi lain ada banyak persyaratan administratif yang harus terpenuhi untuk memperoleh dan melaporkan anggaran tersebut”.

Meski begitu, Gereja Katolik yang mempunyai jaringan struktural kuat, dengan didukung pendanaan yang kuat sebagai pelaksanaan visi Gereja yang mandiri dan visioner sehingga gereja tidak tergantung dengan bantuan dana pemerintah. Dengan demikian, pelayanan keagamaan Katolik tidak terganggu dengan minimnya pendanaan pemerintah. Gereja Katolik adalah gereja yang telah berdiri sebelum terbitnya PBM hanya ada beberapa renovasi kecil dan satu renovasi besar yaitu gereja Katolik Hoya.

Kendala lain yang dihadapi pihak Bimas Katolik dalam segi pendidikan adalah program pembinaan guru agama Katolik nyaris tidak ada. Guru Katolik yang telah tersertifikasi adalah hasil pengangkatan CPNS oleh Pemda dan Pemprov, pembayaran sertifikasinya melalui Kementerian Agama Jayapura. Dengan keterbatasan alokasi dana, seksi Bimas Katolik tidak bisa mengadakan kegiatan pembinaan berkelanjutan terhadap guru binaan mereka

Untuk mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama, pendidikan

agama Katolik pada semua tingkatan pembelajaran saat ini tidak lagi berkuat pada materi dogmatis, namun lebih banyak menekankan pada pendidikan Multikultural berdasarkan semangat semua agama menginginkan kedamaian dan cinta kasih terhadap sesama adalah pesan universal yang Tuhan perintahkan untuk diperjuangkan dalam kehidupan di dunia ini.

Salah satu sekolah yayasan Katolik yang cukup diminati di Jayapura adalah SMK YPPK Taruna Bakti, Waena. Data keseluruhan siswa di sekolah tersebut cukup banyak putra daerah Papua mencapai 47% dari populasi siswa dan sisanya 53% non putra daerah. Dari jumlah siswa tersebut, mayoritas beragama Kristen (Protestan) 58,8%, 40,9% yang beragama Katolik, dan 2 orang yang beragama Islam. Tenaga pendidik juga cukup variatif, yang beragama Katolik 53%, Protestan 41%, Islam 2 orang, dan Hindu 1 orang.

Meskipun mayoritas beragama non Katolik, namun guru agama yang ada hanya guru Pendidikan Agama Katolik (PAK). Sebagai sekolah yayasan tidak menyediakan guru untuk agama lain, meski tidak mampu memenuhi hak peserta didik seperti yang dipersyaratkan UU Sisdiknas dan Peraturan turunannya namun tidak mengurangi minat peserta didik dari non Katolik (Damianus Domeng K; 2017). Ketidakmampuan yayasan menggaji guru agama lain menjadi penyebab selain juga pemerintah tidak mampu menyiapkan guru Agama berstatus PNS untuk agama lain. Dua siswa mengatakan tidak ada persoalan dengan tidak adanya guru pendidikan agama yang seagama, “ini adalah resiko yang harus kami hadapi jika ingin meneruskan bersekolah disini”. Siswa-siswa non Katolik tetap ikut pembelajaran agama Katolik termasuk evaluasi. Melihat jumlah siswa Kristen yang menuntut ilmu di sekolah

Taruna Bakti sudah seharusnya ada guru agama Kristen sesuai dengan Perma No 16 Tahun 2010 dan karena yayasan tidak mampu menyediakan guru tersebut adalah kewajiban Pemerintah membantu mengatasi hal tersebut.

Guru agama Katolik di sekolah tersebut terdiri atas 4 orang dengan 1 orang yang berstatus non PNS. Muatan materi pembelajaran PAK sejak tahun 2006 tidak lagi berkuat soal dogma. Sebagai satu contoh untuk mata pelajaran PAK memuat materi Aspek kepribadian anak, suasana hati untuk mengatasi tantangan kehidupan, Aspek pembentuk iman, kepedulian terhadap alam, multikultural dan toleransi serta pengembangan pribadi siswa. Muatan materi seperti itu bisa diterima oleh semua agama, siswa dari non-Katolik tidak mengalami kesulitan.

Hal ini diamini oleh Kabid Bimas Katolik yang mengungkapkan, bahwa dari sisi pendidikan agama di sekolah cukup terbuka dan tidak pernah menolak siswa dari agama lain, dan juga menghargai agama lain, karena memiliki tujuan yang sama. Meski begitu, pendidikan multikultural ke depannya, perlu dikembangkan. Masalahnya adalah pendidikan agama itu sendiri yang menghalangi pendidikan yang inklusif ini. Karena itu, perlu dirumuskan dalam muatan pendidikan agama ini lebih memuat kepada rasa religiusitas yang berkaitan iman aksi, berkaitan cinta kasih sesama, keadilan itu baik, kami di keuskupan itu berusaha mengganti pendidikan agama dengan pendidikan universalism, pendidikan religiusitas jadi disitu yang dibahas adalah semua nilai agama, cinta kasih menurut islam apa, kristen apa. Tapi itu juga mendapat protes dari dalam Katolik sendiri karena muatan pendidikan agama yang seharusnya masih bersifat dogmatis untuk penguatan iman kepada Kristus.

Jaka Syarif, siswa muslim yang sekolah di Taruna Bakti mengaku, muatan materi yang seperti itu cukup menyulitkan bagi yang tidak ada dasar, untungnya tidak menjadi dasar untuk penilaian prestasi siswa, hanya sebagai penunjang. Berbeda dengan siswa beragama Protestan yang jumlahnya lebih banyak, mereka mampu menyesuaikan diri dengan pembelajaran karena dapat dikatakan serumpun dengan Katolik. Bagi Jaka Syarif dan temannya yang Muslim terpaksa belajar agama dengan otodidak dan ikut mendengar ceramah di masjid berdasarkan dorongan dari orang tua.

Pelayanan Terhadap Umat Hindu

Pelayanan umat Hindu di Kemenag Kota Jayapura dilaksanakan seorang diri oleh Penyelenggara Agama Hindu bernama I Wayan Adnyana. Tidak ada staf yang membantu. Hanya terdapat Penyuluh non-PNS berjumlah 3 orang yang terdiri atas 2 orang *pinandita* dan seorang sarjana agama Hindu. Menurut I Wayan Adnyana, setiap tahun kami mengelola dana sekitar 456 juta yang sebagian besarnya adalah gaji guru dan tunjangan sertifikasi. Dari dana tersebut 10 juta rupiah dialokasikan sebagai bantuan untuk pemeliharaan rumah ibadat yang biasanya diberikan dalam bentuk barang berupa dupa payung atau yang lainnya. Dalam bidang pendidikan agama umat Hindu hingga saat ini hanya terdapat 2 guru PNS yang masing-masing 1 orang bertugas di tingkat SD dan 1 orang guru SMA. Kedua orang guru tersebut merupakan guru agama yang diangkat oleh Pemerintah Kota Jayapura dan mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG/Sertifikasi) dari Kemenag Kota Jayapura, pembayaran TPG dilakukan setiap 6 bulan (Wawancara di Jayapura, 2017).

Penganut agama Hindu merupakan minoritas di antara berbagai agama di Jayapura saat ini. Jumlahnya berkisar 1.900-

an jiwa dan sekitar 600 Kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut fluktuatif, kadang berkurang atau bertambah, disebabkan banyaknya umat Hindu yang hanya berdomisili sementara di Jayapura. Meski banyak umat Hindu yang datang dan pergi dari Jayapura namun bisa tetap terpantau, karena biasanya akan datang ke Pura di Skyland untuk melaksanakan ibadah sekaligus melaporkan diri.

Terdapat dua Pura di Jayapura, sebuah pura terdapat dalam kawasan Kampus IPDN Buper Jayapura dan Pura Agung Surya Bhuvana di Skyland, jalan poros Abepura. Pura di dalam lokasi kampus dibangun untuk mengakomodasi umat Hindu yang mengikuti pendidikan IPDN. Pura tersebut sangat minim aktifitas peribadatannya karena hanya taruna IPDN yang kadangkala menggunakannya, jumlah mereka tidak banyak dan fluktuatif tergantung program pengiriman pelajar ke kampus tersebut.

Pura Agung Surya Bhuvana berdiri cukup megah di atas perbukitan di sisi jalan poros Jayapura. Seringkali ada pengendara yang mampir sekadar mengabadikan keindahan pura tersebut dan panorama yang ada disekitarnya. Penentuan lokasi pendirian pura tersebut mempunyai cerita menarik ini karena pembangunan pura harus menerima izin dari Dewata. Terdapat beberapa lokasi sebelumnya yang cukup bagus dan representatif sebagai rumah ibadat Hindu tapi tidak dijual. Lokasi yang ada sekarang awalnya pada 1978 hanya ditukar dengan beras dan sebagiannya dibayar pada penduduk setempat.

Pura kemudian dibangun meski bentuknya masih sederhana dan pada 2013 dilakukan pembangunan dengan urunan swadaya umat Hindu, bantuan dana pemerintah daerah. Bantuan Kemenag meski jumlahnya sedikit, dana yang digunakan

mencapai 4,5 miliar. Pembangunan pura di Papua mengalami kendala, karena tidak ada pasir yang cocok untuk digunakan. Pasirnya mesti didatangkan dari Bali, sebagian diangkut dari Biak dengan menggunakan kapal tongkang.

Di pura tersebut, terdapat beberapa ruangan yang dimanfaatkan oleh Umat Hindu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti purnama-tilem, kajeng kliwon, Galungan dan Kuningan atau sekedar melepas rindu kampung halaman dengan kegiatan mebanjar, mebat, ngelawar dan menyama braya. Pura Agung Surya Buwana Papua memiliki wantilan yang dipergunakan oleh Umat Hindu untuk berkegiatan me-suka duka. Pada bahagian bawahnya terdapat juga Asrham atau Pasraman yang dipergunakan untuk kegiatan belajar agama terutama pendidikan agama Hindu anak-anak sekolah setiap Minggu.

Sekolah Pashraman tersebut bernama Yayasan Pashraman Shanti Niketan didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan agama bagi anak sekolah. Saat ini terdapat 127 anak yang belajar dari semua tingkatan di sekolah tersebut yang tergabung dalam 7 ruang belajar, minimnya ruang belajar membuat anak-anak dari dua kelas berbeda harus digabung dalam ruangan yang sama, kelas 1 berbagi ruang dengan kelas 2 SD dan seterusnya.

Keberadaan sekolah tersebut sangat penting bagi umat Hindu karena mampu mengisi kekosongan guru agama di sekolah utamanya pada tingkat SMP (Wawancara, I Ketut Puspawa, di Jayapura, 2017). Guru Agama Hindu tersebut juga mengajar di sekolah Pashraman saban hari minggu, selain itu terdapat beberapa orang yang secara sukarela memberikan pengajaran agama diantaranya bapak I Wayan Mudiya yang merupakan Kadis Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Jayapura. Pengajar di sekolah tersebut berasal dari berbagai latar belakang, ada yang memang berprofesi Guru, pegawai Kemenag, pegawai SMK hingga pinandita.

Tidak adanya guru Agama pada sekolah tingkat SMP menjadi persoalan yang cukup pelik bagi umat Hindu karena terdapat 21 siswa pada tingkatan SMP. Kebijakan pengadaan Guru Agama yang diharapkan dari Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi tidak pernah terealisasi. Aturan ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang merupakan kewajiban bagi penyelenggara pendidikan baik Pemerintah atau swasta sebagaimana diatur dalam UU R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada BAB V pasal 12 ayat 1 dan peraturan turunannya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama belum tercapai. Kendala pengadaan guru agama bagi Hindu terletak pada penentuan kuota usulan pengangkatan CPNS yang selalu gagal mengakomodir usulan umat Hindu (Didik Widyaputra, wawancara: 2017), sementara dalam beberapa tahun terakhir juga ada moratorium pengangkatan CPNS. Jalan lain yang cukup mudah adalah mengangkat guru agama honorer atau berstatus PPPK namun belum dilakukan.

Tanggapan Penganut Agama Minoritas terhadap Implementasi Pelayanan Kemenag Jayapura

Pelayanan Kemenag mendapat sorotan dari penganut Hindu dan Katolik, semangat untuk mengimplementasikan pelayanan kementerian agama ini yang didasarkan kepada Misi Kemenag R.I. Nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015 – 2019 pada point empat dan tujuh, yaitu; “Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas” dan “Meningkatkan akses dan

Paisal

kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.” Dinilai hanya sebagai sebuah cita-cita yang masih jauh dari kata tercapai.

Kurangnya alokasi dana dan ketersediaan pegawai Kemenag bagi agama Hindu dan Katolik menjadi persoalan yang cukup krusial. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Bidang Bimas Katolik Kanwil Kemenag Papua, Karyanto,

“Dalam bidang pendidikan dan urusan layanan keagamaan jatah pelayanan pendidikan Katolik terkendala belum ada satker, sementara dalam UU kita tahu tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Sementara jika dibandingkan dengan Bimas Islam untuk penganggaran bidang pendidikan diatas 40 M, bidang katolik hanya sampai 6 M. Dari sisi urusan agama kan Kementerian Agama ini didirikan untuk mengurus agama namun 75% mengurus pendidikan sedangkan anggaran untuk urusan agama ini kecil sekali untuk Papua ini hanya sekitar 1 Trilyun, nah dari situ kita bisa bayangkan pada bagian pelayanan keagamaan ini yang seharusnya kita melayani masyarakat sangat minim. Tupoksi kita misalnya soal kerukunan tapi ketika berbicara fasilitas, bantuan untuk rumah ibadah untuk Katolik hampir tidak ada lagi, untuk bantuan rumah ibadah se Papua tahun 2017 ini hanya untuk 2 gereja itupun jumlahnya hanya 25 juta, yang lain bantuan layanan penyuluhan itu sangat terbatas.” (Wawancara, Karyanto, di Jayapura, 2017)

Dengan keterbatasan anggaran, ada banyak program kegiatan yang terpaksa tidak dilaksanakan di antaranya kegiatan pembinaan penyuluh non-PNS, Program pembinaan guru berkelanjutan dan kompetisi sains antar siswa Katolik (Wawancara, Hendrikus Harun, di Jayapura, 2017). Pastor Andreas Trismadi mengatakan, umat Katolik meski diperlakukan tidak adil tetap bisa *survive*, karena dilandasi oleh iman yang kuat. Sejak 1989, bantuan dari luar negeri sudah

dibatasi untuk umat Katolik. Untuk mengantisipasi hal tersebut dilakukan penguatan visi kemandirian dalam melayani umat. Meski merasa mendapat bagian yang sedikit dari alokasi anggaran dan kurangnya ketersediaan pegawai yang melayani umat Katolik, namun mereka tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah (Wawancara, Bartolomeus, di Jayapura, 2017).

Setali tiga uang dengan Katolik, umat Hindu di Jayapura juga mengalami keterbatasan baik dari sisi personil pegawai maupun dari segi dana. Didik Widyaputra, menyebutkan, meski kegiatan ibadah keagamaan dapat berjalan dengan normal namun itu ditunjang oleh persatuan dan rasa kebersamaan umat Hindu yang bahu membahu baik dalam membangun rumah ibadah maupun kegiatan lainnya. “Kami sudah seringkali mengajukan usulan penambahan personil pegawai maupun guru untuk Hindu namun tidak pernah terealisasi, kami menilai di Kementerian Agama telah berlaku tidak adil terhadap yang mayoritas.” (Wawancara, Didik Widyaputra, Guru Pashraman, di Jayapura, 2017).

Begitupula dengan usulan anggaran kegiatan yang mereka ajukan tidak pernah dipenuhi. Padahal, bila membandingkan daerah Papua dan daerah lainnya memang perlu perlakuan khusus karena keterbatasan sumber daya dan harga barang dan bahan yang lebih mahal. Umat Hindu cukup terlatih untuk beradaptasi dan tetap bergembira dengan keadaan yang sulit. Minimnya pengangkatan guru agama Hindu, baik oleh Kementerian Agama maupun pemerintah daerah dapat dipandang sebagai upaya terstruktur untuk melemahkan posisi umat Hindu pada ranah pendidikan formal. Padahal dalam beberapa tahun ke depan, banyak guru agama Hindu yang akan memasuki masa pensiun.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa kelangkaan guru agama Hindu menjadi bayang-bayang suram pendidikan Hindu pada masa yang akan datang. Tantangan ini akan terasa lebih berat terutama bagi minoritas Hindu di luar Bali. Mengingat pendidikan agama Hindu di luar Bali berimplikasi luas terhadap munculnya persoalan-persoalan yang bersifat krusial, seperti konversi agama. Kelangkaan atau bahkan 'ketiadaan' guru agama Hindu di sekolah-sekolah formal kerap dijadikan senjata ampuh oleh kelompok mayoritas untuk mengkonversi siswa yang beragama Hindu. Seorang siswa yang semula beragama Hindu dapat beralih ke agama lain hanya karena alasan pragmatis, yakni mendapatkan pendidikan agama. Ditambah lagi dengan jumlah siswa beragama Hindu yang relatif kecil, juga dapat membangun struktur psikis minoritas dalam pergaulan lintas agama.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 senyatanya telah menyediakan payung hukum yang jelas dan tegas agar tidak terjadi diskriminasi pendidikan agama di sekolah. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 12 ayat 1 (a) yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Namun dalam praktik, implementasi undang-undang tersebut masih jauh panggang dari api. Nyatanya, masih banyak siswa beragama Hindu yang tidak mendapatkan pendidikan agama Hindu di sekolah, bahkan sampai tamat. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa umat Hindu tidak boleh hanya menunggu itikad baik pemerintah untuk mendapatkan hak-hak pendidikan agamanya.

PENUTUP

Hubungan antar dan intra keagamaan saat ini dalam kondisi yang cukup kondusif,

saling menjaga, saling menghargai dan menghormati. Semua agama dapat tumbuh dan melaksanakan kegiatan keagamaannya tanpa halangan karena didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota yang cukup terbuka dan mengayomi semua pemeluk agama, meski begitu nampak perkembangan agama mayoritas (Kristen dan Islam) di Jayapura lebih signifikan dan didukung dengan pelayanan oleh sumberdaya yang cukup memadai.

Pelayanan Kemenag terhadap penganut agama minoritas Katolik dan Hindu pada setiap lini masih jauh dari kata memuaskan karena terbentur pada kesediaan sumber dana dan sumber daya manusia utamanya pada pelayanan di bidang pendidikan.

Berdasar temuan tersebut, menjadi penting untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap penganut agama minoritas dengan menyediakan sumberdaya yang memadai utamanya bagi Pemerintah (Menteri Atau Pemkot) kekurangan guru agama yang dialami oleh pemeluk agama Hindu dan menyediakan guru agama Kristen di sekolah-sekolah Katolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Makassary, Ridwan; 2016. *Dialog dan Radikalisme Agama di Tanah Papua*. Papua. FKUB Papua
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka & Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKiS, Yogyakarta.
- Sapriillah, 2013. 'Pelayanan Kementerian Agama Terhadap penganut Agama Hindu di Manado Sulawesi Utara' dalam *Alqalam* Volume 19 Nomor 2, halaman 187-198. Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar, 2013, *Pelayanan Kemenag terhadap Penganut Agama Hindu dan Buddha di Kawasan Timur Indonesia*, Laporan

Paisal

- Penelitian Balai Litbang Agama Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar, 2013, *Tingkat Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan Kemenag*, Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar, 2014, *Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8*, Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makassar.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama
- LSM KIPRA. 2014. <http://kipra-papua.com/artikel/26-project-kipra/85-program-pendataan-penduduk-asli-port-numbay>. Diakses 05 Mei 2017.